

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang menganut paham demokrasi, didalam sistem politiknya adanya keanekaragaman politik sangat diakui di negara ini. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman pendapat, aspirasi, sampai kepentingan politiknya sendiri. Untuk mewujudkan sikap yang demokratis tersebut harus adanya partisipasi politik rakyatnya yang tumbuh didalam demokrasi tersebut. Adapun pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh rakyat secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Partisipasi politik merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara yang kehidupan masyarakatnya masih tergolong tradisional dan sifat kepemimpinan politiknya ditentukan oleh segolongan elit penguasa, maka partisipasi warganegara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara relatif sangat rendah. Sementara itu di negara yang proses modernisasi politiknya telah berjalan baik, maka tingkat partisipasi politik warganegara cenderung meningkat.

Partisipasi juga merupakan aspek penting dalam demokrasi. Karena melalui partisipasi masyarakat dapat ikut serta mempengaruhi kebijakan publik yang akan mengenai dirinya. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warganegara biasa

dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Ramlan Subakti,2003).

Partisipasi aktif warga masyarakat memberikan suaranya dalam suatu Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik yang paling dasar ataupun minimal. Oleh karena itu itu sering dijadikan sebagai tingkat ukuran dimana partisipasi politik masyarakat di suatu negara,utamanya di negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan kehidupan masyarakatnya terdapat berbagai macam suku,etnis,maupun agama. Melihat dari berbagai macam etnis yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia terdapat salah satu etnis yang disebut etnis Tionghoa. Etnis ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu atau lama di Indonesia. Sejak jaman kerajaan-kerajaan pun mereka sudah masuk ke Indonesia tepatnya pada masa Kerajaan Kutai dan Singosari yang mereka pun datang ke Indonesia dengan cara berdagang. Etnis Tionghoa pun semakin lama semakin berkembang sampai pada saat jaman kolonial,di jaman ini Etnis Tionghoa pun sempat melawan pemerintahan Belanda yaitu VOC pada tahun 1740-1743.

Kegiatan politik etnis Tionghoa pun selalu berubah dari masa ke masa, di saat Orde Lama ini partisipasi etnis Tionghoa sedikit terlihat dikarenakan pada saat itu Presiden Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1926 meskipun di saat itu etnis Tionghoa hanya diperbolehkan menjadi pengamat saja. Sampai pada akhirnya di tahun 1930 etnis Tionghoa yang ingin diakui keikutsertaannya dalam kancah politik di Indonesia saat itu membentuk Partai Tionghoa Indonesia yang ingin mendukung agar Indonesia dapat merdeka dari penjajah pada saat tersebut.

Saat bangsa Indonesia berhasil merdeka dari penjajah banyak kaum etnis Tionghoa masuk menjadi warga negara Indonesia, dan di tahun 1954 mereka pun mendirikan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) dengan Siauw Giok Tjhan dan Yap Thiam Hin menjadi tokoh didalamnya yang mendorong badan ini lebih dekat dengan PKI pada saat itu.

Namun di saat pemerintahan dari Orde Lama bergerak menjadi Orde Baru tahun 1965 yang saat itu mengakibatkan PKI dilarang, secara otomatis Baperki juga dilarang oleh pemerintah Orde Baru karena dianggap melenceng dan dapat membahayakan bangsa Indonesia sendiri. Di tahun 1965 sendiri menimbulkan kekerasan anti-Tionghoa di Indonesia, karena etnis Tionghoa dituduh membantu PKI dan Baperki. Mulai saat itulah banyak etnis Tionghoa mulai mempertanyakan apakah bijaksana bergabung dengan gerakan politik. Karena itulah, untuk beberapa lama tidak ada partisipasi politik etnis Tionghoa dalam skala besar, sebagaimana partisipasi mereka yang dikenal pada saat Orde Lama di saat Orde Baru ini dapat dibilang sudah habis atau mati.

Pada akhir Orde Baru, pada 14 Mei 1998, kerusuhan melanda Jakarta. WNI etnis Tionghoa dirampok, dijarah, bahkan ada yang diperkosa oleh gerombolan perusuh. Banyak orang berpendapat bahwa kerusuhan tersebut adalah hasil kerja raksasa dari sebuah elite politik yang mempunyai sumber daya yang luar biasa besar dalam hal dana dan manusia. Setelah Orde Baru runtuh, Pemilu 1999 memunculkan fenomena menarik untuk dicermati, khususnya berkaitan dengan perubahan perilaku politik WNI etnis Tionghoa, dikarenakan berdirinya partai-partai Tionghoa seperti Partai Tionghoa Indonesi (Parti), Partai Pembaharuan Indonesia (Parpindo), Partai Bhineka Tunggal Ika (PBI), berdirinya partai tersebut dihadapkan pada kondisi objektif

masyarakat keturunan Tionghoa yang masih mengambil jarak cukup jauh dari politik praktis. Kemunculan partai-partai yang membawa nama Tionghoa dinilai hanya akan membawa kerugian secara politik, dan dikhawatirkan memancing reaksi antipati dari kalangan masyarakat luas.

Hal kebebasan etnis Tionghoa dari zaman Orde Baru hingga sekarang tidak lepas dari jasa seseorang yang disebut-sebut sebagai Bapak Etnis Tionghoa yaitu KH. Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa *Gusdur*. Mengapa dia disebut Bapak Etnis Tionghoa karena pada saat beliau menduduki kursi Presiden beliau mencabut semua peraturan yang mendiskriminasikan kaum Tionghoa dengan mengeluarkan PP. No. 6 Tahun 2000. Bahkan, Gus Dur memberikan apresiasi dengan menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari libur Nasional, sebagaimana hari raya agama-agama lainnya. Inilah wujud keberpihakan Gus Dur terhadap eksistensi etnis Tionghoa. Menurut Gus Dur, etnis Tionghoa adalah sama dengan etnis-suku bangsa yang lain, seperti Jawa, Batak, Papua, Arab, India, Jepang dan Eropa yang sudah sejak lama hidup dan menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Selain itu Gus Dur juga memaparkan bahwa di negeri ini etnis Tionghoa dapat diterima sebagai warga negara dan memiliki hak-hak yang sama dengan warga yang lain, karena mereka lahir di negeri ini dan menjadi warga negara, sehingga sepatutnya juga dikenal sebagai “penduduk asli” seperti yang lainnya pula. Pemaparan serta berkat jasa Gus Dur inilah yang sampai sekarang etnis Tionghoa dianggap keberadaannya di negara Indonesia ini dengan hak-hak yang sama di segala bidang tak terkecuali di bidang politik serta pemerintahan.

Setelah pemerintahan Gus Dur, iklim politik bagi etnis Tionghoa untuk berpartisipasi dalam politik lebih kondusif. Pada Pemilu 2004 dari publikasi media diketahui selama pemilu legislatif, tercatat setidaknya lebih dari seratus calon legislatif etnis Tionghoa

tersebar di beberapa partai politik. Tetapi, hanya sebagian kecil yang berhasil mendapat kursi di DPR. Bahkan dari partai politik yang benuansa etnis Tionghoa, hanya seorang, yaitu Nurdin Purnomo dari Partai Bhineka Tunggal Ika yang berhasil menjadi anggota DPR. Pada Pemilu 1999, etnis Tionghoa tampak malu-malu dan agak canggung dalam berpolitik, namun pada Pemilu 2004 dan 2009 partisipasi etnis Tionghoa terlihat semakin dinamis dan asertif dalam berpartisipasi berpolitik.

Di Provinsi Lampung pun sebenarnya partisipasi politik tidak begitu tampak, Namun demikian, mulai menunjukkan geliat partisipasi politiknya. Dimana pada saat pemilihan legislatif Provinsi Lampung tahun 2004, ada salah satu warga keturunan etnis Tionghoa yang bernama Effendi Taslim memberanikan diri untuk berpartisipasi serta mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dan beliau pun akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD pada saat itu. Pada pemilihan selanjutnya tepatnya di tahun 2009 warga keturunan etnis Tionghoa kembali terlihat dalam pencalonan anggota legislatif dengan nama Hartanto Lojaya yang sampai sekarang masih duduk di kursi DPRD Provinsi. Selain itu sudah mulai bermunculan warga-warga di Bandar Lampung khususnya menjadi kader-kader partai yang ada di kota tersebut sehingga partisipasi etnis Tionghoa saat ini sudah terbilang mengalami kemajuan.

Melihat dari partisipasi politik yang ada di kota Bandar Lampung dan sekitarnya, hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk mengetahui partisipasi etnis Tionghoa di kabupaten-kabupaten yang ada di Lampung sendiri pada saat pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah yang khususnya diadakan di daerah Kabupaten Pringsewu. Hal yang telah sama kita ketahui bahwa Kabupaten tersebut belum lama ini mengadakan pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah nya untuk periode

2011-2016. Didalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada tanggal 28 September 2011 tersebut adapun nama cabup dan cawabup seperti berikut

Tabel 1. Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Pringsewu 2011

NO	BALONBUP	NO	BALONWABUP	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs.Hi.Untung Subroto,MM	1.	Drs.Hi.Purwanto,ST,MM	2.752 (1,39 %)
2.	Hj. Ririn Kuswantari S,Sos	2.	Subhan Effendi,SH.	70.37 (35,54 %)
3.	Hi.Abdullah Fadri Auli SH.	3.	Hi.Triprawoto,MM	28.702 (14,49 %)
4.	Sinong Gatot Wiyono,SE	4.	Hi.Mat Alfi Asha,SH	20.605 (10,41 %)
5.	Hi.Sujadi	5.	Hi.Narapati,SH	75.581 (38,17 %)

Sumber: KPUD Pringsewu

Melihat dari fakta yang ada dari bagan tersebut seperti di ketahui tidak ada dari kelima nama cabup dan cawabup tersebut yang mempunyai darah keturunan Tionghoa, bahkan pemenang pemilihan kepala daerah tersebut pun yang dimenangkan oleh pasangan Hi.Sujadi dan Hi.Narapati pun bukan merupakan warga keturunan tionghoa. Selain itu setelah penulis melakukan pra-riset dilokasi penelitian yang pada saat itu melakukan pra-riset di lingkungan tempat tinggal mayoritas berpenduduk Tionghoa tepatnya di jalan Mawar I-IV Desa Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu yang diperjelas dengan adanya bangunan Vihara Boedhicita di daerah tersebut sehingga memperjelas bahwa di lingkungan tersebut terdapat masyarakat etnis Tionghoa berdomisili di sekitar lingkungan tersebut. Di Desa Pringsewu Selatan tersebut menurut kepala RT setempat yang juga merupakan etnis Tionghoa menyebutkan dilingkungannya ada sekitar 193 orang saja yang berdomisili di lingkungannya.

Dari fenomena tersebut lah penulis melihat ketertarikan untuk melakukan riset mengenai partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pilkada Kabupaten Pringsewu dikarenakan dilihat dari jumlah etnis Tionghoa yang sedikit tersebut apakah mereka masih mau berpartisipasi memberikan suaranya dalam pemilukada Kabupaten

Pringsewu 2011, yang dimana dilihat dari calon-calon nya saja tidak ada yang berdarah etnis Tionghoa.

Riset sebelumnya terhadap Partisipasi politik etnis Tionghoa ini adalah Partisipasi politik Etnis Tionghoa pada pemilihan Presiden Putaran I di kota Bandar Lampung. Riset ini dilakukan oleh Nur Ailiyawati mahasiswa Pemerintahan angkatan 2002 Fisip Unila. Riset yang dilakukan terlebih dahulu mengenai partisipasi etnis Tionghoa, penelitian terdahulu hanya sebatas mengenai bentuk partisipasi yang ada di kota Bandar Lampung saja pada saat itu. Yang pada saat itu bentuk partisipasi etnis Tionghoa nya ialah bentuk partisipasi konvensional saja. Riset penelitian yang akan saya lakukan ini dikatakan riset lanjutan dari sebelumnya, yaitu mencoba untuk mengetahui lebih lanjut bentuk partisipasi politik etnis Tionghoa didalam suatu pemilihan umum serta menambahkan mengenai intensitas suatu partisipasi etnis Tionghoa dalam suatu pemilihan kepala daerah, dimana pada riset sebelumnya meneliti hanya sebatas di kota Bandar Lampung namun riset saya ini akan meneliti partisipasi etnis Tionghoa di sebuah kabupaten yaitu Kabupaten Pringsewu.

B. Rumusan Masalah

Pada bidang politik etnis Tionghoa cenderung menunjukkan ketidakstabilan dalam partisipasinya, ini dapat dilihat dari masa Orde Lama menuju Orde Baru sampai akhirnya masa reformasi sampai saat ini, hal ini mungkin didorong oleh keadaan politik yang terjadi dari masa ke masa di negara Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimanakah bentuk dan intensitas partisipasi etnis Tionghoa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pringsewu 2011“ .

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu 2011.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai kajian bentuk dan intensitas partisipasi politik khususnya etnis Tionghoa dalam Pemilihan Kepala daerah serta memberi referensi kajian tentang partisipasi politik di Kabupaten Pringsewu.

b. Kepentingan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat mengenai partisipasi politik kaum minoritas yang ada di Indonesia khususnya etnis Tionghoa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Pringsewu.
2. Suatu acuan untuk meningkatkan partisipasi politik etnis Tionghoa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi kasus sehingga di masa yang akan datang tidak terjadi lagi diskriminasi politik terhadap kaum minoritas.